



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id) ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1941/DJA.3/TI1.3.1/VIII/2025  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Hal : Pemberitahuan Pemberlakuan  
*Pilot Project* Smart Majelis

8 Agustus 2025

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
6. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Ketua Pengadilan Agama Cirebon;
8. Ketua Pengadilan Agama Praya;
9. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
10. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
11. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
12. Mahkamah Syar'iyah Calang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Meneruskan surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI Nomor 161/BUA.6/TI1.1.2/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan Pemberlakuan *Pilot Project* Smart Majelis, disampaikan hal-hal berikut:

1. Satuan kerja yang ditunjuk oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI untuk menjadi *pilot project* Smart Majelis yaitu:
  - a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
  - b. Pengadilan Agama Cirebon;
  - c. Pengadilan Agama Praya;
  - d. Pengadilan Agama Magelang;
  - e. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
  - f. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe; dan
  - g. Mahkamah Syar'iyah Calang.
2. Uji coba aplikasi Smart Majelis Tingkat Pertama berlangsung selama 3 bulan sejak tanggal rilis aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 6.0.0.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Satuan kerja yang menjadi *pilot project* wajib menggunakan aplikasi Smart Majelis di aplikasi SIPP Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan dan petunjuk penggunaan yang disampaikan ketika Sosialisasi Implementasi Smart Majelis Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025.
4. Materi sosialisasi dapat diakses pada tautan <https://s.id/SosialisasiSmartMajelisTK1>.
5. Dalam hal terjadi kendala teknis dalam implementasi Smart Majelis, satuan kerja yang menjadi *pilot project* segera melaporkan kendala tersebut ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama untuk diteruskan secara kolektif kepada Biro Hukum dan Humas c.q. Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI.
6. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama yang satuan kerja di wilayah hukumnya ditunjuk menjadi *pilot project* agar melakukan pemantauan pelaksanaan fitur Smart Majelis.
7. Bagi satuan kerja yang tidak ditunjuk menjadi *pilot project* agar tidak menggunakan fitur Smart Majelis sampai pemberitahuan lebih lanjut demi menjaga kelancaran dan kualitas implementasi.

Demikian, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta 10110 - Tromol Pos No.1020  
Telepon : (021) 3843348 – 3810350 – 3454546; www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 161/BUA.6/TI1.1.2/VIII/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pemberlakuan  
*Pilot Project* Smart Majelis

Jakarta, 7 Agustus 2025

Yth. Bapak/Ibu

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

di -

Tempat

Menindaklanjuti Arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juli 2025 perihal Implementasi Smart Majelis Tingkat Pertama yang dilaksanakan secara bertahap pada Pengadilan Tingkat Pertama yang ditunjuk sebagai *Pilot Project* berdasarkan klasifikasi kelas sebagai berikut :

1. Pengadilan Kelas IA Khusus
2. Pengadilan Kelas IA Provinsi (terdapat perkara PHI dan Tipikor)
3. Pengadilan Kelas IA
4. Pengadilan Kelas IB
5. Pengadilan Kelas II
6. Mahkamah Syariah Kelas IA
7. Mahkamah Syariah Kelas IB
8. Mahkamah Syariah Kelas II
9. Pengadilan Militer Kelas A
10. Pengadilan Militer Kelas B
11. Pengadilan Militer Tinggi Kelas A sebagai Tingkat Pertama
12. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A Khusus
13. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A
14. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kelas A sebagai Tingkat Pertama



Adapun daftar Pengadilan Tingkat Pertama yang di tunjuk sesuai dengan hasil rapat koordinasi Biro Hukum dan Humas dengan Badan Peradilan pada tanggal 31 Juli 2025 sebagai *Pilot Project* Implementasi Smart Majelis yaitu :

No	Nama Pengadilan	Kelas
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
2.	Pengadilan Negeri Makassar	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
3.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Kelas IA Provinsi
4.	Pengadilan Negeri Kupang	Pengadilan Negeri Kelas IA
5.	Pengadilan Negeri Subang	Pengadilan Negeri Kelas IB
6.	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	Pengadilan Negeri Kelas II
7.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Pengadilan Agama Kelas IA
8.	Pengadilan Agama Cirebon	Pengadilan Agama Kelas IB
9.	Pengadilan Agama Praya	Pengadilan Agama Kelas IB
10.	Pengadilan Agama Magelang	Pengadilan Agama Kelas II
11.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Mahkamah Syar'iyah Kelas IA
12.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Mahkamah Syar'iyah Kelas IB
13.	Mahkamah Syar'iyah Calang	Mahkamah Syar'iyah Kelas II
14.	Pengadilan Militer II – 08 Jakarta	Pengadilan Militer Kelas A
15.	Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta	Pengadilan Militer Kelas B
16.	Pengadilan Militer III – 13 Madiun	Pengadilan Militer Kelas B
17.	Pengadilan Militer III Surabaya	Pengadilan Militer Tinggi Tipe A sebagai tingkat Pertama
18.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A Khusus
19.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A
20.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B
21.	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C
22.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Banding Sebagai Tingkat Pertama



Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh Badan Peradilan untuk dapat:

1. Menyampaikan kepada masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama yang ditunjuk sebagai *Pilot Project* di atas bahwa ujicoba aplikasi Smart Majelis Tingkat Pertama berlangsung selama 3 bulan sejak tanggal rilis aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 6.0.0.
2. Menggunakan aplikasi Smart Majelis pada aplikasi SIPP Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan dan petunjuk penggunaan yang disampaikan ketika Sosialisasi Implementasi Smart Majelis Tingkat Pertama pada Jumat, 1 Agustus 2025. Materi Sosialisasi dapat diakses pada tautan <https://s.id/SosialisasiSmartMajelisTK1> ;
3. Setiap *Pilot Project* yang ditunjuk, diharapkan dapat melaporkan kendala teknis yang dihadapi lebih lanjut kepada masing-masing Badan Peradilan dan Badan Peradilan akan meneruskan kendala yang dihadapi sebagai secara kolektif kepada Biro Hukum dan Humas cq. Bagian Pengembangan Sistem Informatika.
4. Untuk menjaga kelancaran dan kualitas implementasi smart majelis pada masa evaluasi, setiap Badan Peradilan dapat menyampaikan ke seluruh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa fitur Smart Majelis **hanya diperuntukkan** untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai Pilot Project.
5. Memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.

Demikian, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA-RI  <b>Sobandi</b>
---	--

